

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona di Indonesia masih menjadi polemik yang berkelanjutan di dalam pembahasan pemerintahan saat ini, maka dari itu pemerintah dan masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk saling bekerjasama dalam memutus percepatan penanganan *Covid-19*. Perbincangan ini menjadi fokus di berbagai negara dengan masalah Covid19, maka seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik harus lebih ekstra demi mempercepat pemutusan mata rantai *Covid-19* khususnya di Indonesia. Yang menjadi fokus utama penelitian saya yaitu pukesmas. Puskesmas menjadi salah satu garda terdepan dalam mencegah penyebaran virus Corona yang masih terus menyerang masyarakat meskipun data saat ini dikabarkan terjadi penurunan untuk pasien yang positif dan yang meninggal dunia.

Jumlah kasus virus Corona terus bertambah, ada yang Sembuh dan ada yang meninggal terjadi peningkatan kasus. dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan yang cepat karena belum ada obat-obatan. khususnya untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan pengaturan untuk memerangi infeksi (*Covid-19*). Di Indonesia, salah satunya adalah pendekatan yang harus lebih di tekankan mengenai pencegahan penularan virus *Covid-19*. Pencegahan itu bisa dilakukan seperti membatasi mobilitas masyarakat dengan melakukan sosialisasi Sejak awal pandemi 2020 hingga semester 1 2021 kebijakan pembatasan pergerakan pemerintah daerah dimulai dengan istilah PSBB (pembatasan sosial besar-besaran) dan di tidak lama berselang waktu kebijakan baru lagi dikeluarkan oleh pemerintah yang di beri nama dengan istilah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Pada april 2020 uji coba pencegahan virus *Covid-19* terus berkembang, Penanganan situasi ini telah membawa dampak yang besar terhadap Perubahan masyarakat dan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan hal ini sering menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada manusia. Berbagai diskusi dan tes telah dilakukan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*. Sektor swasta, pemerintah, dan warga masyarakat semua bekerja sama untuk membuat keputusan tentang bagaimana mempercepat proses.

Hari demi hari tak luput juga bulan virus corona menjadi masalah terdalam di kehidupan masyarakat Situasi darurat memburuk karena *Covid19*. Publik tentu menuntut pemerintah berbuat lebih cepat dan tegas menyikapi upaya penyelesaian masalah. Virus yang banyak merenggut kebahagiaan hingga nyawa masyarakat, Dalam hal ini pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus *Covid-19* sudah seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat sehingga berbagai cara dan upaya yang dibuat tidak sia-sia. Salah satunya bisa melalui penyuluhan dan edukasi publik ke masyarakat bisa secara virtual atau sosialisasi langsung, maka pemberitahuan dengan hal ini pemerintah menerapkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi 3 M yaitu memakai masker, memcuci tangan, dan menjaga jarak, dari peraturan 3 M ini kita selaku masyarakat yang patuh sudah memenuhi kewajiban untuk saling menjaga dan membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai covid-19 di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ternyata tidak begitu langsung menyumbat jalannya virus *Covid-19*, penerapan-peneran baru terus dilanjutkan demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Mengingat setelah negara China berhasil membuat vaksin untuk virus *covid-19* yang dinamakan vaksin *sinovac*, pemerintah Indonesia langsung bergigih untuk mendapatkan produk vaksin tersebut, setelah itu menerapkan program vaksinasi bisa langsung diterapkan demi mengurangi penularan virus Covid19.

Pemerintah menempuh kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pengadaan vaksin dan penyediaan vaksin *covid-19* sebagai respon

terhadap *covid-19* yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi atau mengurangi infeksi *covid-19* menurut angka kesakitan dan kematian dengan *covid 19* mencapai *herd immunity* melindungi masyarakat dari *covid-19* dan menjaga produktivitas.

Mengingat dengan tersedianya imunisasi Covid-19 untuk membangun ketahanan masyarakat, diperkirakan setidaknya 70% atau 182 juta penduduk Indonesia wajib diimunisasi dengan imunisasi Covid-19. Selain itu, pemerintah menyerahkan alih penggunaan program imunisasi kepada Puskesmas untuk secara khusus mengintervensi penggunaan di lapangan, baik secara campuran maupun virtual penyuluhan terkait imunisasi, namun pelaksanaan vaksinasi sejauh ini belum semulus yang diharapkan. , kira-kira berita untuk masyarakat. Siapa tahu. Kejelasan ini membuat beberapa orang menolak untuk diimunisasi. Untuk memastikan masyarakat di seluruh Indonesia, puskesmas juga menjadi yang terdepan dalam menyelamatkan nyawa masyarakat di Indonesia, mengingat petugas puskesmas harus bekerja lebih keras dalam upaya penanganan penularan Covid-19. Agen BPOM (Dr. Lucia Rizka) merinci secara bebas di seluruh Indonesia sehubungan dengan perizinan antibodi Covid-19 dan Covid-19. penting untuk kesejahteraan terbuka, dan kami berupaya menyediakannya dengan menghitung keterusterangan dalam perangkat pembuatan kebijakan pada Desember 2020.

Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang membuat dan membuat vaksin *vaccine.covid.19* dan berencana untuk mengimmunisasi warganya, sehingga seperti kita ketahui bahwa imunisasi sangat membantu dalam menghindari penyakit Covid-19. Imunisasi tidak mengasuransikan individu tetapi secara berlebihan mengasuransikan orang, misalnya mengasuransikan orang yang tidak dapat diimmunisasi pada usia tertentu atau yang menderita penyakit tertentu. Antibodi yang telah diberikan oleh BPOM (Badan Pengkajian Gizi dan Obat Penenang) tidak berasa sehingga terjamin keamanannya, dan imunisasi umumnya tidak menimbulkan reaksi dengan

efek samping yang berlebihan jika mengetahui cara imunisasi Covid-19. 19. Pemanfaatan administrasi imunisasi pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, swasta, dan pihak terkait. sehingga pertimbangan utamanya adalah puskesmas merupakan salah satu dinas kesehatan yang terkuat dalam pelaksanaannya. Program Imunisasi Covid-19.

Puskesmas bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga memudahkan Puskesmas untuk melihat dan mempertimbangkan sasaran di tengah pelaksanaan program vaksinasi. Agar Puskesmas dapat melihat lebih luas susunan program imunisasi yang akan dilakukan kepada masyarakat untuk mendukung harapan terhindar dari Covid-19. Di sisi lain, tujuan terbesar dari program vaksinasi adalah untuk menekan penularan penularan Covid-19. Keterbukaan kita sebagai masyarakat harus tetap bermanfaat secara sosial dan intervensi keuangan dianut untuk mendukung penggunaan tradisi kesejahteraan yang meyakinkan untuk memutus rantai komunikasi. Imunisasi yang diberikan kepada masyarakat dan kelompok untuk mencapai kekebalan yang paling luar biasa dapat dibentuk jika cakupan vaksinasi tinggi dan disebarluaskan secara merata di seluruh wilayah.

Penggunaan program imunisasi harus dipikirkan matang-matang karena tidak wajar semua orang bisa diimunisasi walaupun sebenarnya orang tersebut memiliki legalitas kesehatan. Pelaksanaan imunisasi membutuhkan orang-orang yang diatur sebagai pemasok imunisasi, sebagai pemasok antibodi yang berperan besar dalam penggunaan imunisasi Covid-19. Pemerintah menargetkan 90.000 orang untuk divaksinasi di wilayah tersebut. Yang melakukan imunisasi adalah tenaga kesehatan yang diatur secara remedial dari tunjangan (Puskesmas, Puskesmas, KKP, dan Klinik). Jenis ahli kesehatan tertentu adalah ahli restoratif, dokter spesialis kandungan dan dokter kandungan yang bersedia berkompeten di bidang pekerjaannya sebagai penanggung jawab penggunaan. vaksinasi Covid-19. Imunisasi juga diharapkan dapat mempengaruhi imunisasi pada kelompok

sejahtera dan masyarakat karena imunisasi harus dapat mengatur dan menargetkan kebutuhan koordinasi imunisasi.

Puskesmas merupakan lembaga yang sepenuhnya dilimpahkan dan disertai oleh pemerintah untuk menangani imunisasi, namun pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang luar biasa berat karena harus berhadapan dengan manfaat masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya. kasus dan berita seputar isu inokulasi tersebar, baik berita harian maupun di internet. atau media sosial dalam hal counter-acting agent clearance, pengaruh berita ini sangat jarang sehingga dapat mempengaruhi kekuatan penanganan program imunisasi Covid-19 dan masalah imunisasi yang dijual kepada banyak orang. Berita membingungkan ini telah menyebabkan gejolak mental di antara individu. Memang meskipun kebenaran berita tersebut tidak dapat diketahui, namun dapat dipastikan pengaruhnya akan sangat luas. Mengingat alamat kira-kira wilayah yang akan diteliti berada di wilayah masyarakat kota, berita yang disampaikan tidak jelas, sangat mudah untuk tetap berada di benak masyarakat kota. Seperti kegiatan imunisasi ini, kata dia, bisa jadi masalah administrasi pemerintah, imunisasi tidak benar-benar membuat tubuh aman, orang yang melakukan imunisasi bisa tertular Covid-19, apalagi ada kabar setelah melakukan antibodi, ada orang yang menendang ember atau lumpuh. belum lagi berbagai kesalahan yang dilakukan oleh petugas puskesmas dalam menjalankan program vaksinasi seperti kamar agen counter, surat penawaran imunisasi, penawaran cairan agen counter.

Melalui hal tersebut, masyarakat enggan untuk melakukan imunisasi terhadap Covid-19, padahal jika kita melihat ke depan, efek dari antibodi tersebut sangat baik untuk sistem pertahanan tubuh sehingga resistensi yang diharapkan dapat terjadi. diandalkan. Dalam hal pemeriksaan secara koheren, masih banyak kemungkinan hasil yang belum berjalan secara umum atau belum dipikirkan secara matang oleh petugas puskesmas, seperti kerangka organisasi program vaksinasi yang belum sepenuhnya diaktualisasikan secara sah dalam hal bahan cetakan. Hal ini mengalami

kendala dan juga dapat dilihat dari kenyamanan masyarakat dalam menjalankan program vaksinasi seperti kursi kantor. Tanpa kita sadari hal-hal tersebut, seringkali masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi karena masyarakat melihat dan merasa tidak aman terhadap program agen penanggulangan pemerintah..

Selanjutnya, potensi kesalahan yang dilakukan oleh petugas lapangan program imunisasi merupakan opini publik yang khas dalam melihat kesimpulan terkait program imunisasi. Namun, hal yang harus diperhatikan petugas adalah kepekaan terhadap kemungkinan bentuk-bentuk ketidakhormatan dari masyarakat yang berada di zona tersebut. Sehingga individu seperti ini tidak dianjurkan oleh petugas puskesmas untuk program imunisasi. Oleh karena itu, masyarakat yang mendapat jaminan akses mudah terhadap informasi dengan cepat mengubah tanggapan dan pilihan mereka sehubungan dengan program imunisasi Covid-19 yang menurun. prosedur komunikasi baik dalam hal koordinasi maupun penjangkauan virtual dan membuat deklarasi mengundang. Pusat Hubungan Terbuka Kesejahteraan Masyarakat harus mampu meredam kecemasan masyarakat agar pemanfaatan program imunisasi berjalan lancar dan sejalan dengan kemajuan yang dinanti-nanti oleh semua orang.

Dari data yang diambil salah satu puskesmas kecamatan, ternyata memang terjadi penurunan yang sangat luar biasa pada penggunaan antibodi dosis pertama, kedua dan ketiga. Dosis imunisasi awal sebanyak 41.584 orang, dosis pendek sebanyak 25.704 orang, dosis ketiga sebanyak 10.864 orang, dan jumlah sasaran sebanyak 51.708 orang. Hal ini terlihat dari penurunan imunisasi yang sangat kritis dari perkiraan pertama, kedua dan ketiga. Maka jangan heran jika petugas puskesmas yang setiap hari menangani imunisasi selalu berpikiran sia-sia untuk mengubah pengakuan masyarakat atas berita yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas,peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “ **Strategi Komunikasi Humas Puskesmas Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat**

## **Dalam Meningkatkan Antusias Masyarakat Program Vaksinasi Covid-19 “**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi komunikasi Humas Puskesmas Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam meningkatkan antusias masyarakat program vaksinasi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan diatas maka tujuan dari pemikiran ini adalah untuk mengetahui Open Relations Peraturan Puskesmas Prestasi Daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap program imunisasi *Covid-19*?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara hipotesis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman modern bagi mahasiswa yang memiliki hipotesis, khususnya Ilmu Komunikasi dan menghitung metodologi komunikasi Humas Open Wellbeing Center di Daerah Lengkap dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap program inokulasi Covid-19.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang metodologi komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga mampu memberikan informasi dan data terkini seputar penelitian ini.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Proposal ini disusun mengacu pada manual yang diterapkan oleh Disnaker IPS Sumut Medan. Wacana efisien yang digunakan adalah 5 (lima) bab. Masing-masing digambarkan berikut ini :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan tentang latar belakang dilaksanakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Menyajikan hipotesis yang digunakan dalam renungan ini dengan mengacu pada referensi yang ada. Pertimbangan hipotetik meliputi sifat teknik, sifat komunikasi, sifat hubungan terbuka, pengorganisasian kesejahteraan, penjangkauan dan imunisasi Covid-19, masing-masing hipotesis akan disajikan dengan sub bab sesuai kebutuhan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Menampilkan strategi investigasi yang digunakan, mulai dari pendekatan investigasi, waktu dari tempat investigasi, penentuan subjek investigasi, tahapan investigasi, strategi pengumpulan informasi, strategi pengecekan informasi, dan strategi pengecekan kebenaran informasi.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menampilkan informasi yang diperoleh melalui penyelidikan berarti setuju dengan perincian masalah. Informasi diperoleh melalui persepsi, dokumentasi dan wawancara dengan petugas puskesmas terbuka. Informasi dianalisis dengan menggunakan prosedur pengenalan informasi, dan penarikan kesimpulan.

## **BAB V KESIMPULAN/PENUTUP**

Bab ini dapat berupa kesimpulan yang berisi kesimpulan dan usulan baik bagi pihak pendidikan maupun pihak lain yang digunakan sebagai acuan untuk perubahan di masa mendatang.